

**PENERAPAN KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM*  
DALAM PENGELOLAAN WISATA KULINER TRADISIONAL  
PASAR YOSOMULYO PELANGI KOTA METRO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**EMA DIYA YUSITA  
NPM. 1716041033**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM* DALAM PENGELOLAAN WISATA KULINER TRADISIONAL PASAR YOSOMULYO PELANGI KOTA METRO**

Oleh

**EMA DIYA YUSITA**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Akan tetapi negara memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya. Maka perlunya penciptaan lapangan kerja pada lingkungan masyarakat, salah satunya dapat melalui sektor pariwisata. *Community Based Tourism* (CBT) merupakan konsep yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan logika induktif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CBT pada prinsip ekonomi berupa tercipta lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat; prinsip sosial, adanya peningkatan kebanggaan komunitas; prinsip budaya, masyarakat menghormati budaya yang berbeda dalam kegiatan pariwisata; prinsip lingkungan, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan; prinsip politik, terdapat partisipasi dari masyarakat lokal, namun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Yosomulyo belum berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Payungi.

**Kata Kunci:** *Community Based Tourism* (CBT), Partisipasi Masyarakat.

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION OF THE CONCEPT OF COMMUNITY BASED TOURISM IN MANAGEMENT OF TRADITIONAL CULINARY TOURISM IN YOSOMULYO PELANGI MARKET METRO CITY**

**By**

**EMA DIYA YUSITA**

Every citizen has the right to get a job and a decent living as described in the 1945 Constitution Article 27 paragraph 2, so that the state has an obligation to make it happen. But countries have limitations so that they have not been able to create jobs for all their people. So the need for job creation in the environment community, one of which can be through the tourism sector. Community Based Tourism (CBT) is a concept that makes the community as the main actor in tourism activities. This research aims to obtain an overview of Community Based Tourism management in Market Yosomulyo Pelangi (Payungi) Metro City. The method used is qualitative, with inductive logic. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that the application of the CBT concept to economic principles in the form of creating jobs in the tourism sector and the generation of community income; social principles, an increase in community pride; cultural principles, society respecting different cultures in tourism activities; principle environment, there is an environmentally friendly waste disposal system; principle politics, there is participation from the local community, but the Tourism Awareness Group Yosomulyo Village has not participated in tourism activities in Payungi.

**Keywords: Community Based Tourism, Society Participation.**

**PENERAPAN KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM*  
DALAM PENGELOLAAN WISATA KULINER TRADISIONAL  
PASAR YOSOMULYO PELANGI KOTA METRO**

**Oleh**

**EMA DIYA YUSITA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **PENERAPAN KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM* DALAM PENGELOLAAN WISATA KULINER TRADISIONAL PASAR YOSOMULYO PELANGI KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Ema Diya Yusita**

No. Pokok Mahasiswa : **1716041033**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Noverman Duadji, M.Si.**  
NIP. 19691103 200112 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meiliyana'.

**Meiliyana, S.IP., M.A.**  
NIP. 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Penguji Utama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Oktober 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ema Diya Yusita  
NPM 1716041033

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ema Diya Yusita, lahir pada tanggal 13 Desember 1999 di Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Penulis merupakan anak tunggal dari Bapak Susilo Sudarman dan Ibu Murwati. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Eka Mulya, Mesuji Timur pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Mesuji Timur pada tahun 2011-2012 dan SMPN 1 Punggur, Lampung Tengah pada tahun 2013-2014. Setelah itu melanjutkan ke pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Punggur pada tahun 2014-2017.

Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis menjadi anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Unila. Penulis pernah mengikuti UKM Pramuka Racana Unila pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2020, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Pada tahun 2020 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro.



## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Bersyukurlah, maka apa yang menjadi milikmu akan terasa cukup  
dan bebanmu akan ringan”

(Ema Diya Yusita)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua orang tuaku**

**Bapak Susilo Sudarman dan Ibu Murwati**

**Keluarga besarku**

Terimakasih yang tak terhingga atas semua dukungan yang telah diberikan, doa yang selalu diucapkan, serta kasih sayang yang berlimpah.

**Sahabat tersayang**

Terimakasih atas motivasi dan dukungan yang selalu diberikan.

Serta,

**Almamater tercinta**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan isinya. Berkat segala kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro”***.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam banyak hal untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. sebagai dosen sekaligus ketua jurusan Administrasi Negara.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. sebagai dosen sekaligus sekretaris jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
5. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. sebagai dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis untuk memperbaiki

kesalahan dan kekurangan skripsi ini, serta ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.

6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti kedepannya.
7. Terimakasih kepada Pengurus Pasar Yosomulyo Pelangi atas izin yang telah diberikan untuk melakukan penelitian, ilmu serta segala kebaikan yang telah diberikan.
8. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bude Wartini, Bulek Yani, Mbah Uti, Mba Dwi, Mas Nanang yang selalu mendoakan untuk segala kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini, kasih sayang yang berlimpah, serta motivasi dan dukungan yang telah diberikan. Terimakasih kepada keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu namanya.
9. Terimakasih kepada guruku Bapak Made Widiyana, Bapak Pendi Hartanto, Ibu Purwati, Ibu Karyati, Ibu Duwi yang telah memberikan motivasi dan ilmunya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
10. Sahabatku Isna Khoirun Nisa, Oktivia Asyari, Adelia Selawati, terimakasih selalu menemani penulis turun lapang dalam pengerjaan skripsi ini, semoga segera menyusul mendapat gelar sarjana. Muhammad Nur Kholis terimakasih atas kebaikan yang selalu diajarkan, motivasi yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini, semoga niat baikmu segera terlaksana. Mellynia, Zealia, Meydita, terimakasih telah memberikan motivasi, dukungan, dan semangat.
11. Teman-teman terbaikku di kampus Manda Amelia, Marlina Puji Lestari, Sinta, Sitti Ulfa Khaliza, Aling Mai Linda Sari, Indah Pratiwi, Anisa Utami, Fatimah Sepni, Refiyana, Rani. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama empat tahun ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan kelak kita menjadi orang sukses.
12. Terimakasih Wahyudi, Mba Anisa, dan Dewi Syintia yang selalu membantu memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam

mengerjakan skripsi ini hingga selesai, serta beberapa pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

13. Terimakasih ketua kelas Hamzali Yaqub, Bayu Cindi Katon, dan Andre Ridho Ilahi yang selama perkuliahan selalu membantu teman-temannya, kalian orang-orang hebat yang baik hati.
14. Teman-teman ANGKASA, terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama kurang lebih empat tahun ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan dan Rezeki yang berkecukupan, serta balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu, dan teman-teman semua atas kebaikan dan bantuannya selama ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021

Penulis,

Ema Diya Yusita

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 <i>Community Based Tourism</i> (CBT) .....	10
2.2.1 Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT).....	10
2.2.2 Prinsip-prinsip dalam <i>Community Based Tourism</i> (CBT) .....	16
2.3 Pariwisata .....	20
2.3.1 Konsep Pariwisata.....	20
2.3.2 Jenis-jenis Wisata.....	22
2.3.3 Fungsi Pariwisata .....	23
2.3.4 Daya Tarik Wisata.....	25
2.3.5 Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataaan .....	27
2.3.6 Potensi Wisata .....	28
2.3.7 Pelaku Pariwisata .....	28
2.4 Kebijakan Kepariwisataaan di Indonesia .....	30
2.5 Kerangka Pikir.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Metode.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.2.1 Jenis Data .....	38
3.2.2 Sumber Data.....	38

3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.4	Teknik Analisis Data .....	43
3.5	Teknik Keabsahan Data.....	45
3.6	Fokus Penelitian .....	47
3.7	Lokasi Penelitian .....	48
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1	Kelurahan Yosomulyo.....	49
4.1.2	Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi).....	53
4.2	Hasil.....	56
4.2.1	Prinsip Ekonomi.....	56
4.2.2	Prinsip Sosial.....	67
4.2.3	Prinsip Budaya .....	72
4.2.4	Prinsip Lingkungan .....	77
4.2.5	Prinsip Politik.....	83
4.3	Pembahasan .....	86
4.3.1	Prinsip Ekonomi.....	86
4.3.2	Prinsip Sosial.....	91
4.3.3	Prinsip Budaya .....	93
4.3.4	Prinsip Lingkungan .....	96
4.3.5	Prinsip Politik.....	99
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
5.1	Simpulan.....	105
5.2	Saran.....	106
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Matriks Perbandingan Penelitian .....	8
2. Data Informan .....	39
3. Dokumen Terkait Pariwisata.....	42
4. Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kelurahan Yosomulyo .....	49
5. Penduduk Kelurahan Yosomulyo Menurut Kelompok Usia .....	50
6. Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Yosomulyo .....	52
7. Data Pekerjaan Dan Omset Masyarakat yang Tergabung di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) .....	57
8. Rekapitulasi Omset Gelaran Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro 2018-2021 .....	63
9. Omset Parkir Pasar Yosomulyo Kota Metro Januari 2020–Maret 2021.....	65
11. Tabungan Komunitas Payungi di Bank Sampah Cangkir Hijau .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep dan Arti Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. ....	14
2. Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata. ....	31
3. Kerangka Pikir. ....	36
4. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/Model Interaktif. ....	45
5. Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Berbagai-macam cara pada sumber yang sama). ....	46
6. Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data (Satu teknik pengumpulan data pada berbagai-macam sumber data A,B,C). ....	46
7. Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi). ....	54
8. Wawancara dengan Ibu Sabichis (Pedagang Payungi). ....	61
9. Wawancara dengan Ibu Nurjanah (Pedagang Payungi). ....	62
10. Wawancara dengan Bapak Ahmad Tsauban (Ketua Payungi). ....	66
11. Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan (Penggagas Payungi). ....	68
12. Wawancara dengan Ibu Nurjanah (Pedagang Payungi). ....	69
13. Wawancara dengan Ibu Sabichis (Pedagang Payungi). ....	69
14. Wawancara dengan Agung (Pengunjung Payungi). ....	70
15. Wawancara dengan Ibu Melidarti Jayasinga (Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro). ....	71
16. Pameran Lukisan Pasar Yosomulyo Pelangi. ....	73
17. Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan (Penggagas Payungi). ....	74
18. Wawancara dengan Ibu Nurjanah (Pedagang Payungi). ....	75
19. Wawancara dengan Agung (Pengunjung Payungi). ....	76
20. Wawancara dengan Agung Prasetyo (Pengunjung Payungi). ....	77
21. Wawancara dengan Bapak Dharma Styawan (Panggagas Payungi). ....	78
22. Wawancara dengan Bapak Ahmad Tsauban (Ketua Payungi). ....	79
23. Proses Pemilahan Sampah Organik dan Non-Organik Oleh Pedagang. ....	79

24. Wawancara dengan Erik (Ketua Bank Sampah Cangkir Hijau).....	81
25. Wawancara dengan Bapak Ahmad Tsauban (Ketua Payungi).....	83
26. Wawancara dengan Ibu Melidarti Jayasinga (Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro).....	84
27. Wawancara dengan Bapak Sukadi (Ketua Pokdarwis Kelurahan Yosomulyo).....	85
28. Pasar Yosomulyo Pelangi Diliput Oleh TVRI dalam Siaran Selamat Pagi Indonesia.....	92
29. Kuliner Tradisional di Pasar Yosomulyo Pelangi.....	95
30. Gotong Royong Membersihkan Lokasi Destinasi Wisata Pasar Yosomulyo Pelangi.....	97
31. Penyuluhan Pembuatan Pupuk Kompos.....	98
32. Kegiatan Pesantren Wirausaha.....	101
33. Sekolah Penggerak Pariwisata.....	104

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Akan tetapi negara memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada Februari 2018 sebesar 5,13% atau setara dengan 6,87 juta jiwa dari jumlah seluruh penduduk Indonesia sebanyak 267,7 juta jiwa (Asmara, 2018).

Masalah pengangguran tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, akan tetapi juga terjadi pada lingkup regional seperti pada Kota Metro yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, pengangguran di Kota Metro tercatat sebanyak 9.564 orang pada tahun 2018 (Yolanda dkk., 2021). Guna mengurangi angka pengangguran tersebut, maka perlu adanya dorongan agar terciptanya lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja di lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan karena pengangguran akan berdampak buruk jika hanya dibiarkan dan akan menjadi masalah bersama. Untuk itu, perlunya gerakan dari masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk melakukan inovasi dalam menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan masyarakatnya.

Sebagaimana pemerintah telah mengamanatkan setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya otonomi daerah agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki. Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerahnya,

salah satu sektor yang dikembangkan adalah pariwisata. Pariwisata mempunyai potensi dalam meningkatkan perekonomian. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting serta fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan serta peluang usaha.

Besar kecilnya pengaruh pariwisata secara ekonomis dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu pengaruh terdapat pendapatan, lapangan pekerjaan, neraca pembayaran, dan investasi. Menjadikan destinasi wisata dengan potensi lokal yang dimiliki merupakan salah satu kegiatan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Lapangan kerja yang tercipta dari sektor pariwisata juga sangat membantu masyarakat lokal sebagai mata pencaharian. Pentingnya pengoptimalan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal tetapi juga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemerintah juga memiliki peran penting dalam pembangunan pada sektor pariwisata.

Kota Metro memiliki potensi kepariwisataan berupa daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang dapat dikembangkan. Menyadari potensi yang dimiliki, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata yang memberikan aturan bagi pelaksanaan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan agar selaras dengan visi Kota Metro. Dalam Perda tersebut dijabarkan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Disamping itu, masyarakat memiliki beragam resep serta kekayaan jenis masakan dari tradisi dan etnik yang ada.

Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengolah makanan dapat dikembangkan menjadi sajian kuliner tradisional yang dikemas semenarik mungkin untuk dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Metro. Masyarakat tidak dapat hanya bergantung dengan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja, akan tetapi masyarakat dapat bergerak tanpa harus terus mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menyikapi permasalahan

pengangguran di Kota Metro, maka muncul inisiasi dari Bapak Dharma (akademisi) untuk menggerakkan masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kelurahan Yosomulyo, Kota Metro dalam mengembangkan pariwisata dengan dibentuknya Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi).

Kawasan Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) awalnya merupakan gang sempit kini menjadi destinasi wisata yang dikenal dengan pasar digital yang menawarkan kuliner tradisional dan taman edukasi. Kegiatan pasar ini sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas yang bernilai ekonomi agar meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menambah lapangan kerja. Dalam pengelolaan Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, Komunitas Payungi, Komunitas Bank Sampah Payungi, dan pemerintah sebagai fasilitator. Sebagai destinasi wisata yang memiliki konsep berbasis masyarakat, tentu partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hingga melindungi kehidupan, sosial, dan budaya.

Sebelum adanya destinasi wisata ini, sebagian masyarakat khususnya ibu-ibu hanya menggantungkan pendapatan dari suaminya, namun saat ini bisa mendapat keuntungan dari berjualan di setiap gelaran Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi). Menurut Ibu Rusdiana, selaku warga asli RW 07 Kelurahan Yosomulyo yang ikut serta berdagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) sejak awal didirikan, beliau mengatakan bahwasanya dengan adanya Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) di lingkungan tempat tinggalnya memberikan dampak perubahan perekonomian bagi beliau yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga. Saat ini Ibu Rusdiana setiap minggunya sudah bisa memperoleh penghasilan sendiri sebesar Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 per-gelaran pasar. Tidak hanya Ibu Rusdiana, berdasarkan data hasil riset terdapat 65 masyarakat lainnya yang setiap gelaran memiliki omset Rp.500.000 sampai dengan Rp. 4.000.000.

Dalam satu bulan uang yang masuk di kawasan Payungi mencapai Rp.180.000.000. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat. Selain untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat yang

berdagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) diharuskan untuk mengikuti setiap peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama seperti mengikuti pesantren wirausaha, bersedekah makanan sebelum gelaran dimulai, menginfakkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan masjid di lingkungan pasar, serta gotong royong dalam mempersiapkan lokasi sebelum gelaran dan membersihkan lingkungan pasar usai gelaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut mencerminkan bahwa tidak hanya keuntungan materi dan pengembangan destinasi wisata saja, akan tetapi juga untuk menumbuhkan guyub di lingkungan masyarakat.

Model pengembangan pariwisata sangat diperlukan dalam membangun dan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata. Seperti pariwisata yang berbasis masyarakat memiliki berbagai kelebihan baik dari aspek pengembangan masyarakat maupun industri pariwisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat atau yang biasa disebut dengan *Community Based Tourism* (CBT) muncul sebagai sebuah alternatif dari arus utama pengembangan pariwisata. Sebagaimana Hausler (2005), mendefinisikan CBT merupakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen atau pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat tentunya tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, keberhasilan ini akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, efektif atau tidaknya penerapan konsep CBT tergantung pada level partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga akan menjadi tidak ada artinya jika pengembangan destinasi wisata tidak memperhatikan masalah-masalah yang terkait dengan infrastruktur, pendanaan, pemasaran, dan prasyarat utama dari eksistensi suatu objek wisata.

Terdapat tiga unsur penting CBT yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen dan pengembangan pariwisata, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemberdayaan politik (*capacity building*) masyarakat lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai pengambil

keputusan. Dalam pengelolaannya terdapat istilah pemicu, penggerak dan penguat, pemicu disini diartikan sebagai yang melatarbelakangi terciptanya kegiatan pariwisata. Di Payungi Kota Metro yang menjadi pemicu terjadinya kegiatan pariwisata yaitu keinginan untuk memiliki pendapatan, aktor penggerak yaitu akademisi, pemerintah sebagai aktor penguat, serta komunitas Payungi dan masyarakat sebagai pihak yang mengelola objek wisata.

Dalam wawancara bersama penggerak wisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), Bapak Dharma mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator hanya berperan sebagai penasihat dalam pengelolaan destinasi wisata, serta dalam pemberian sarana dan prasarana belum ada keterlibatan dari pemerintah. Meski begitu, Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Metro yang berjalan baik dalam pengelolaannya, dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberhasilan penerapan *Community Based Tourism* (CBT) tergantung karakteristik dan kondisi masyarakat atau komunitas pada sekitar destinasi wisata sehingga model pelaksanaan CBT di wilayah satu dengan lainnya berbeda (Nurhidayati & Fandeli, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro**”. *Community Based Tourism* (CBT) ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat pariwisata diperuntukkan bagi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah merupakan persoalan yang harus dipecahkan dan eksistensinya penting dalam riset, karenanya masalah riset dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai, sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam konteks penelitian ini titik tekannya adalah memperoleh gambaran pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) di Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat adalah nilai guna, sebagai kontribusi nyata baik untuk subjek yang diteliti, untuk diri peneliti, maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara. Hasil penelitian dapat memberikan nilai guna berupa:

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kajian-kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

#### 2. Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk Pemerintah Daerah Kota Metro dalam menjadikan percontohan membuat objek wisata yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat.

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mempromosikan objek wisata.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat merupakan pariwisata yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam perencanaan hingga evaluasi melibatkan masyarakat didalamnya. Tidak hanya itu, hasil berupa manfaat dari kegiatan pariwisata diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hudson dan Timothy (Sunaryo, 2013), juga menjelaskan bahwa pariwisata yang berbasis komunitas atau masyarakat merupakan suatu wujud aktif pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat sekitar tempat wisata.

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dan bahan referensi peneliti dalam melakukan penelitian agar memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan teori maupun konsep. Dengan menggunakan penelitian terdahulu, peneliti dapat belajar dari penelitian lain untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian. Peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan matriks perbandingan penelitian berupa beberapa jurnal terkait yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Penelitian

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
<p><b>Sri Endah Nurhidayati dan Chafid Fandeli</b>            “Penerapan Prinsip <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur”</p>	<p>Penerapan prinsip <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu, Jawa Timur menghasilkan sebagian besar sektor bisnis pariwisata menyerap tenaga kerja masyarakat lokal, meningkatkan persepsi positif individu terkait perkembangan agrowisata, meningkatkan kebanggaan masyarakat, kekuatan modal sosial menghasilkan perubahan dalam masyarakat, semakin memperkuat budaya lokal dengan adanya interaksi antara wisatawan dan komunitas menghasilkan pertukaran budaya dengan wisatawan, dapat memperkuat organisasi lokal yang berperan dalam mekanisme pengendalian pengelolaan sumber daya pariwisata dan menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan, serta telah menghasilkan model-model penentuan daya dukung secara lokal.</p>	<p>Indikator yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsip budaya yaitu memperkuat budaya lokal dengan melakukan pertukaran budaya dengan wisatawan.</p> <p>Sedangkan peneliti menggunakan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda.</p>
<p><b>Retno Dewi Pramodia Ahsani, dkk</b>            “Penerapan Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa”</p>	<p>Pengelolaan Desa Wisata Candirejo dalam satu kelompok kerja yaitu Koperasi Desa. Dampak dari diterapkannya konsep CBT dari aspek ekonomi (diversifikasi pekerjaan, perbaikan kondisi perumahan, perkembangan bisnis baru), aspek sosial (interaksi sosial, partisipasi masyarakat, perubahan pola pikir), adopsi budaya dan lingkungan (perbaikan fasilitas umum). Dengan pemenuhan indikator kemandirian desa, tidak seluruhnya Desa Candirejo bisa dilepaskan dari dana bantuan pemerintah</p>	<p>Fokus pada penelitian ini yaitu melihat dampak penerapan konsep CBT dan kemandirian desa dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan masyarakat, terselenggaranya fasilitas publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Sedangkan peneliti berfokus pada penerapan konsep CBT dengan menggunakan teori Suansri (2003) yaitu, melihat aspek utama dalam pengembangan CBT dengan lima prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.</p>

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
<b>Berry Ziwista</b> “Pengelolaan Berbasis <i>Community Based Tourism</i> Pada Objek Wisata Air Panas Pawan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”	Pengelolaan objek Wisata Air Panas Pawan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat setempat, karena masyarakat belum dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, investor, pelaksanaan, dan evaluasi	Penelitian ini mengkaji pengelolaan wisata berbasis CBT dengan menggunakan teori Argyo Demartoto (2009), yaitu perencanaan, investor, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi atau pemantauan dan kendala dalam pengelolaan CBT.  Sedangkan peneliti menggunakan teori Suansri (2003), yaitu dengan melihat aspek utama dalam pengembangan CBT dengan melihat lima prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

Sumber: (Nurhidayati & Fandeli, 2012), (Ahsani dkk., 2018), dan (Ziwista, 2016).

Tiga penelitian tersebut fokusnya membahas tentang:

1. Penerapan prinsip *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan agrowisata di Kota Batu.
2. Dampak penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam mewujudkan kemandirian Desa Candirejo dengan indikator desa mandiri yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan masyarakat, terselenggaranya fasilitas publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Pengelolaan berbasis *Community Based Tourism* pada objek Wisata Air Panas Pawan kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang dianalisis menggunakan teori berbasis masyarakat Argyo Demartoto (2009), yaitu perencanaan, investor, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi atau pemantauan dan kendala dalam pengelolaan CBT.

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan, sehingga penulis masuk diranah kosongnya yaitu penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam

pengelolaan wisata kuliner tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro dengan menggunakan teori *Community Based Tourism* Suansri (2003), yang melihat aspek utama dalam pengembangan CBT melalui lima prinsip yaitu, Prinsip ekonomi, dengan indikator terciptanya lapangan pekerjaan dan timbulnya pendapatan masyarakat. Prinsip sosial, dengan indikator adanya peningkatan kebanggaan komunitas. Prinsip budaya, dengan indikator mendorong untuk menghormati budaya yang berbeda. Prinsip lingkungan, dengan indikator terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Prinsip politik, dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal.

## **2.2 *Community Based Tourism (CBT)***

### **2.2.1 Konsep *Community Based Tourism (CBT)***

*Community Based Tourism (CBT)* merupakan sebuah konsep pariwisata yang mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat atas kemajuan pariwisata di wilayah terkait. CBT adalah konsep pariwisata yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan menggunakan konsep pengembangan masyarakat. Konsep *Community Based Tourism (CBT)* muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an akibat adanya kritikan atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh *mass tourism*. Kemudian mendapatkan perhatian lebih pada tahun 2000, dimana Bank Dunia (*World Bank*) mulai memikirkan bagaimana cara menanggulangi kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan istilah *Community Based Tourism (CBT)*.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sangat ditekankan dalam konsep CBT yang juga merupakan pilar utama agar masyarakat mampu mandiri dalam mengelola potensi pariwisata di wilayahnya secara bersama-sama. Konsep CBT juga mengacu pada kearifan lokal setiap wilayah yang memang sudah menjadi budaya wilayah itu sendiri. Sunaryo (2013), mengungkapkan bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategis

pengembangan kepariwisataan saat ini, yang dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam pengembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented* model) yang sering kali mendapatkan banyak kritik yang telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi wisata.

Murphy (Sunaryo, 2013) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri. Kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang ada pada destinasi wisata.

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, (Sunaryo, 2013) mengungkapkan pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategis

perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT), yaitu:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan pariwisata.
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

*Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan (Hadiwijoyo, 2012). Menurut Tresiana dan Duadji (2018), CBT tidak berada pada tataran bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi komunitas, tetapi lebih pada bagaimana pariwisata berkontribusi dalam proses pembangunan masyarakat. CBT lebih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan pariwisata terhadap masyarakat (komunitas) dan sumber daya lingkungan, dalam hal ini wisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat dalam mengatur sumber daya yang ada melalui partisipasi masyarakat langsung.

Hausler mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai konsep pariwisata yang memberikan peran kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat langsung dalam manajemen dan pembangunan pariwisata di daerahnya (Sunaryo, 2013). Murphy menyatakan pada dasarnya pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan antara sumber daya yang tersedia dengan kearifan lokal baik dalam bentuk fisik dan nonfisik elemen, dimana hal tersebut merupakan unsur pokok dalam pariwisata (Sunaryo, 2013). Kegiatan tersebut bisa dikategorikan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berwujud komunitas.

Batas pemahaman pariwisata mengacu pada komunitas atau pariwisata berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi: a) Bentuk pengelolaan pariwisata yang berpeluang bagi masyarakat sekitar tempat wisata untuk melakukan sistem *controlling* dalam keterlibatannya dalam hal pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang ada; b) Bentuk manajemen pariwisata

yang dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis pariwisata juga dapat memperoleh manfaat dari pariwisata yang ada; dan c) Bentuk-bentuk pariwisata yang mengacu pada pemberdayaan terstruktur secara terbuka yang memberikan manfaat positif dalam hal pengelolaan wisata.

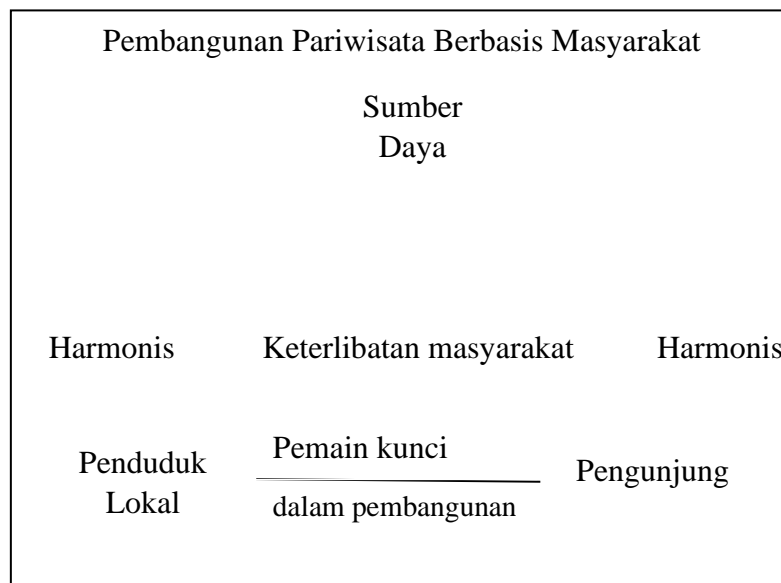
Terdapat sembilan karakteristik kepariwisataan berbasis masyarakat (Paturusi, 2008), yakni:

- 1) Berskala kecil;
- 2) Dimiliki oleh anggota atau kelompok masyarakat setempat, sehingga memberi manfaat pada masyarakat setempat;
- 3) Memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat;
- 4) Lokasinya tersebar tidak terkonsentrasi di suatu tempat;
- 5) Desain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat;
- 6) Mengedepankan kelestarian wawasan budaya;
- 7) Tidak mematikan industri dan kegiatan lainnya saling melengkapi;
- 8) Menawarkan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan; dan
- 9) Merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pembangunan pariwisata kerakyatan berbeda dengan pariwisata konvensional. Pembangunan ini lebih dikenal dengan model *bottom up*, pembangunan sebagai *social learning* yang menuntut adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengelolaannya. Pariwisata yang berbasis budaya harus memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh masyarakat yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut (Pitana & Diarta, 2009), sehingga akan mengarah pada sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat sebagai pelaku utama dalam pariwisata.

Kebijakan lebih lanjut dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di destinasi pariwisata adalah jajaran pemerintah dan swasta menjamin bahwa

manfaat pengembangan destinasi wisata itu dapat dinikmati oleh masyarakat lokal, mereka akan memberikan dukungan dan partisipasinya termasuk dalam pelestarian aset-aset alam dan budaya yang terdapat pada destinasi wisata. Berikut skema konsep dan arti penting pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat menurut Natori (Hidayanti, 2020):



Sumber: Natori (Hidayanti, 2020).

**Gambar 1. Konsep dan Arti Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat.**

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa salah satu aspek penting untuk mensukseskan pariwisata adalah penerapan pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat harus memperhatikan empat unsur utama, yaitu kesuksesan atau ketercapaian, pelestarian lingkungan, kemajuan ekonomi, serta pengelolaan yang berkesinambungan.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya dengan



berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Artinya pengelolaan kepariwisataan diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan otonomi daerah.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 yang memberikan aturan bagi pelaksanaan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan agar selaras dengan visi Kota Metro tahun 2016-2021. Dalam Perda tersebut dijabarkan bahwa penyelenggaraan Kota Wisata di Kota Metro harus mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian masyarakat lokal dan pengembangan wilayah serta kondisi sosial budaya masyarakat Kota Metro (Prihantika dkk., 2019).

Dalam Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan kota wisata dan tugas dalam penyelenggaraan pariwisata dijalankan oleh bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dengan memberikan masukan baik lisan maupun tulisan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pariwisata.

Menurut Anonim (Suwarjo, 2019) pariwisata yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Tourism*) bertujuan untuk:

1. Memajukan tingkat hidup masyarakat dan sekaligus melestarikan identitas serta tradisi lokal.
2. Meningkatkan pendapatan secara ekonomis dan sekaligus mendistribusikan pada masyarakat lokal.
3. Berorientasi pada pengembangann wirausaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
4. Mengembangkan semangat kerja sama sekaligus kompetisi.

5. Kepemilikan bersama aset dan sumber pariwisata dengan anggota masyarakat.
6. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penunjang tradisi budaya.

Berdasarkan konsep *Community Based Tourism* (CBT) diatas dapat disimpulkan bahwa CBT sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (*mass tourism*). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata tujuan untuk melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat, sehingga dapat memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi serta masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola suatu pembangunan dalam bidang pariwisata. Akan tetapi, meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada faktor masyarakat sebagai pelaku utama, peran lainnya seperti pemerintah dan swasta juga diperlukan.

### **2.2.2 Prinsip-prinsip dalam *Community Based Tourism* (CBT)**

*Community Based Tourism* (CBT) dikembangkan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara berbagai pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini lebih menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan yang dinilai dari kegiatan perencanaan, pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi, masyarakat wajib dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berperan didalamnya. Karena tujuan akhir dari CBT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seorang ahli pariwisata, yaitu Hudson dan Timothy (Sunaryo, 2013), juga menjelaskan bahwa pariwisata yang berbasis komunitas atau masyarakat merupakan suatu wujud aktif pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat sekitar tempat wisata.

Menurut Suansri (2003), terdapat beberapa prinsip dasar dalam *Community Based Tourism* (CBT), yaitu:

- 1) Mengakui, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan komunitas dalam pariwisata;
- 2) Melibatkan masyarakat dalam memulai setiap aspek;
- 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas;
- 4) Meningkatkan kualitas hidup;
- 5) Menjamin kelestarian lingkungan;
- 6) Melestarikan keunikan karakter dan budaya daerah setempat;
- 7) Mendorong pembelajaran pertukaran budaya;
- 8) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- 9) Mendistribusikan manfaat secara adil diantara anggota masyarakat;
- 10) Menyumbangkan persentase pendapatan tetap untuk proyek-proyek komunitas.

Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah, dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Meskipun dalam prinsip dasar yang disampaikan secara eksplisit tersebut lebih memfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi ide utama yang disampaikan dalam sepuluh prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam pariwisata. Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan sosial budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan.

Menurut (Suansri, 2003), *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun lima prinsip dalam aspek utama pengembangan CBT menurut (Suansri, 2003), yakni:

- 1) Prinsip ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
- 2) Prinsip sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup; peningkatan kebanggaan komunitas; pembagian peran yang adil

- antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua; membangun penguatan organisasi komunitas.
- 3) Prinsip budaya, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
  - 4) Prinsip lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
  - 5) Prinsip politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kepuasan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lima prinsip CBT seperti diatas yang telah disampaikan oleh (Suansri, 2003) memiliki *spektrum* yang cukup luas. Misalnya dalam prinsip ekonomi, tidak hanya membahas terciptanya lapangan pekerjaan dan timbulnya pendapatan masyarakat, namun juga memperlihatkan perlunya dana komunitas atau dana bersama yang dapat bermanfaat untuk seluruh komunitas, baik yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata atau yang tidak. Dalam prinsip ekonomi juga dikembangkan *spectrum* CBT, tidak hanya terkait dengan anggota komunitas yang berkaitan langsung dalam industri pariwisata tetapi seluruh komunitas sebagai sebuah kesatuan. Dalam hal ini (Suansri, 2003) tidak hanya memikirkan kebutuhan praktis (jangka pendek) komunitas, tetapi juga kebutuhan strategis (jangka panjang).

Dalam prinsip sosial (Suansri, 2003) juga mempertimbangkan kebutuhan strategis komunitas, yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik melalui pengembangan pariwisata. Dalam kualitas hidup tercakup aspek pendidikan dan kesehatan sebagai investasi bagi kualitas komunitas kedepan. Sementara untuk kebutuhan praktis, dapat dilihat dengan pentingnya keadilan gender, keterlibatan semua generasi dan peningkatan kebanggaan lokal. Dengan demikian *spectrum* yang diangkat mewakili sebagian unsur dalam komunitas yaitu gender dan lintas generasi. Dalam pandangannya, (Suansri, 2003) melihat bahwa komunitas merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang membentuk yaitu individu dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya itu, komunitas juga dilihat dari aspek gender yang terkait dengan

peran-peran yang dikonstruksi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan pengembangan pariwisata.

Prinsip budaya dari (Suansri, 2003) juga melihat aspek budaya secara mendalam, yaitu dengan adanya budaya pembangunan yang berkembang dengan adanya pengembangan pariwisata, maka terjadilah pertukaran budaya dan menghormati budaya lain. Dari prinsip lingkungan (Suansri, 2003) memiliki perhatian khusus pada kepedulian terhadap konservasi, tidak hanya berkaitan dengan pengembangan daya dukung lingkungan dan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Akan tetapi juga pentingnya partisipasi semua pihak dalam melakukan konservasi pada lingkungan di destinasi wisata.

Sedangkan prinsip politik yang dijadikan indikator oleh (Suansri, 2003) mencakup *spectrum* internal dan eksternal. Internal yang berkaitan dengan komunitas itu sendiri yaitu, adanya partisipasi masyarakat lokal dan perluasan kekuasaan komunitas. Sedangkan mekanisme yang menjamin hak komunitas lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aspek eksternal yang melibatkan regulasi pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dari berbagai prinsip yang dikemukakan oleh ahli dalam menerapkan konsep CBT dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata agar berjalan dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat lokal.

## 2.3 Pariwisata

### 2.3.1 Konsep Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan (aktivitas perjalanan) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, bersifat sementara dan dilakukan untuk tujuan berlibur atau rekreasi. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa konsep wisata dan pariwisata adalah:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- b) Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Istilah pariwisata belum dipahami banyak orang, namun para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia mengartikan bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling.

Pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Pariwisata terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan antar kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, dan lainnya (Safitri, 2012).

Definisi luas dikemukakan oleh (Herawati, 2015), pariwisata merupakan perjalanan di satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan oleh perorangan atau kelompok, sebagai suatu usaha mencari keseimbangan

dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Adapun lingkup kegiatan pariwisata dinyatakan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Industri pariwisata mempunyai sejumlah karakteristik unggul (Sunaryo, 2013), antara lain sebagai berikut:

- a. Sektor pariwisata mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha mikro.
- b. Sektor kepariwisataan menyerap banyak sumberdaya setempat.
- c. Industri pariwisata tidak mengenal *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan terbukti tidak terpengaruh dengan krisis.

Sektor pariwisata mampu menghidupkan ekonomi masyarakat disekitarnya, pariwisata juga diposisikan sebagai sarana penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam daerah terkait. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang dapat terus diperbaharui dan diremajakan, bentuk peremajaan dapat berupa renovasi, dan perawatan secara teratur, oleh sebab itu maka pariwisata merupakan investasi yang penting. Pariwisata yang merupakan investasi ekonomi masa depan akan secara otomatis mempermudah pertukaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata. Tidak hanya itu, pariwisata dapat meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, namun tentu saja keberhasilan dalam pengembangan pariwisata tersebut akan mampu dirasakan apabila faktor-faktor pendukungnya telah dipersiapkan dengan baik.

Berdasarkan seluruh definisi tentang konsep pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dan bukan untuk menetap. Kegiatan perjalanannya bertujuan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang dibutuhkan selama berada di luar tempat tinggalnya.

### 2.3.2 Jenis-jenis Wisata

Indonesia memiliki kondisi geomorfologis dan geografis yang berbeda pada setiap daerahnya, ataupun memiliki hasil warisan dari nenek moyang yang beragam. Setiap daerah memiliki potensi objek wisata yang berbeda-beda, sehingga timbulah berbagai macam jenis wisata yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata dengan ciri khas yang dimiliki pada masing-masing destinasi wisata.

Menurut Ismayanti (2010), wisata dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Wisata Olahraga

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga aktif yang mengharuskan wisatawan melakukan gerak olah tubuh secara langsung. Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan olahraga pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, melainkan hanya menjadi penikmat dan pecinta olahraga saja.

b. Wisata Kuliner

Motivasi dalam jenis wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya. Pengalaman makan dan memasak dari aneka ragam makanan khas tiap daerah membuat pengalaman yang didapat menjadi lebih istimewa.

c. Wisata Religius

Wisata ini dilakukan untuk kegiatan yang bersifat religi, keagamaan, dan ketuhanan.

d. Wisata Agro

Wisata ini memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan rekreasi. Dimana usaha agro yang biasa dimanfaatkan bisa berupa usaha



dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, maupun perikanan.

e. Wisata Gua

Wisata gua merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke dalam gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua.

f. Wisata Belanja

Wisata ini menjadikan belanja sebagai daya tarik utamanya.

g. Wisata Ekologi

Jenis wisata ini merupakan bentuk wisata yang menarik wisatawan untuk peduli kepada ekologi alam dan sosial.

Berbagai jenis wisata dapat berkembang di kemudian hari, seiring berubahnya keinginan dan ketertarikan dari wisatawan. Hal ini tentunya dapat membuka bisnis pariwisata yang harus mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan yang diminati oleh wisatawan.

### **2.3.3 Fungsi Pariwisata**

Fungsi pariwisata mencakup tiga aspek, hal ini dikemukakan oleh Hartono (Aryunda, 2011), bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya, berintikan tiga segi yaitu segi ekonomi (sumber devisa dan pajak), segi sosial (penciptaan kesempatan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan Indonesia pada wisatawan asing).

a) Fungsi pariwisata dari segi ekonomi

Dari segi ekonomi dapat dikemukakan bahwa dari sektor pariwisata dapat diperoleh devisa, baik berupa pengeluaran para wisatawan asing maupun sebagai penanam modal dalam industri pariwisata termasuk penerimaan berupa retribusi bagi wisatawan. Adapun jumlah penerimaan dari sektor pariwisata ditentukan oleh tiga faktor utama

yaitu: Jumlah wisatawan yang berkunjung, jumlah pengeluaran wisatawan, lamanya wisatawan yang menginap.

b) Fungsi pariwisata dari segi sosial

Jika dilihat dari segi sosial, fungsi yang paling dominan dari sektor pariwisata adalah perluasan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha kepariwisataan dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pariwisata sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga dapat membantu mengurangi persoalan pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja secara langsung dapat dikemukakan, misalnya di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, obyek wisata, dan kantor pariwisata pemerintah. Sedangkan penyerapan tenaga kerja tidak langsung, seperti meningkatnya hasil produksi dibidang pertanian dan kerajinan tangan karena termotivasi dengan kunjungan wisatawan.

c) Fungsi pariwisata dari segi budaya

Dari segi budaya pariwisata dapat diartikan sebagai memperkenalkan dan mendayagunakan kebudayaan Indonesia. Diketahui bahwa sesungguhnya kebudayaan merupakan milik rakyat sebuah negara yang merupakan manifestasi dari karya dan kreasi yang spiritual dari manusia yang membentuk rakyat sebuah negara dan menjadi sasaran utama dari perasaan keingintahuan dari seseorang yang asing bagi negara tersebut. Seperti tentang alam Indonesia yaitu panorama alam, iklim tropis, daerah khatulistiwa yang dipadukan dengan aneka ragam koleksi seni budaya dan tata kehidupan masyarakat yang khas adalah merupakan salah satu sumber berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dijelaskan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Beberapa komponen yang terdapat pada pasal ini, antara lain:

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Berdasarkan fungsi pariwisata tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata berfungsi untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

#### **2.3.4 Daya Tarik Wisata**

Kegiatan wisata di sebuah wilayah tidak lengkap tanpa adanya daya tarik wisata atau *tourist attraction*. Daya tarik wisata merupakan fokus utama pergerakan pariwisata di sebuah destinasi. Dalam artian, daya tarik wisata sebagai penggerak utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat, serta daya tarik wisata juga menjadi fokus orientasi bagi pembangunan wisata terpadu (Ismayanti, 2010).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 5 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu,

daya tarik wisata harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungan dan kesinambungannya terjamin.

(Bagyono, 2014), menyatakan bahwa suatu daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga syarat, adalah sebagai berikut:

- a. *Something to see* (Ada yang dilihat)  
Di tempat tersebut harus ada objek dan daya tarik wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain, daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan *entertainment* bagi wisatawan. Yang dapat dilihat meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata.
- b. *Something to do* (Ada yang dikerjakan)  
Di tempat selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.
- c. *Something to buy* (Ada yang dibeli/ souvenir)  
Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal.

Adapun daya tarik wisata yang merupakan sasaran perjalanan wisata (Ismayanti, 2010), adalah sebagai berikut:

- 1) Daya tarik wisata alam atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti: pemandangan alam, iklim, cuaca, gunung, pantai, bukit, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.
- 2) Daya tarik wisata yang merupakan hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya. Ada juga daya tarik buatan manusia yang bisa juga berupa perpaduan buatan manusia dan keadaan alami, seperti: agrowisata (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan.
- 3) Sasaran minat khusus seperti: berburu, mendaki gunung, goa, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai deras, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat ziarah.

Berdasarkan seluruh definisi diatas dapat disimpulkan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

### **2.3.5 Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata**

Dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa terdapat delapan prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan, diantaranya adalah:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antar-sektor, antar-daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; dan
- g) Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari delapan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pariwisata harus memperhatikan dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya tentang hubungan manusia dan penciptanya, hubungan sosial masyarakat dan lingkungannya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pariwisata juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, serta menjaga hubungan antar *stakeholders* yang terlibat, dan tidak memecah kesatuan negara.

### 2.3.6 Potensi Wisata

Potensi adalah suatu aset yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata atau aspek wisata yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tidak mengesampingkan aspek sosial budaya. Dengan demikian potensi wisata secara umum dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. *Site Attraction*, adalah suatu tempat yang dijadikan objek wisata seperti tempat-tempat tertentu yang menarik dan keadaan alam.
- b. *Event Attraction*, adalah suatu kejadian yang menarik untuk dijadikan *moment* kepariwisataan seperti pameran, pesta kesenian, upacara keagamaan, konvensi dan lain-lain.

Daerah tujuan wisata (*Tourism Resort*) adalah daerah atau tempat yang karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas kepariwisataan menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kunjungan wisatawan. Secara umum potensi wisata yang ada dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- 1) Potensi alamiah merupakan potensi yang ada di masyarakat, seperti potensi fisik dan geografis, seperti potensi alam.
- 2) Potensi budaya merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tentang potensi wisata dapat disimpulkan bahwa potensi wisata merupakan segala aspek yang dimiliki daerah tujuan wisata baik potensi alamiah maupun potensi budaya yang dapat dimanfaatkan.

### 2.3.7 Pelaku Pariwisata

Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terkait dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik dan Weber (Yuliana, 2019) yaitu:

#### 1) Wisatawan

Wisatawan merupakan konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (ekspektasi, minat, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang beragam dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan perbedaan yang dimiliki, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan dan produk dan jasa wisata.

#### 2) Industri Pariwisata atau Penyedia Jasa

Industri pariwisata atau penyedia Jasa merupakan semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:

- a) Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan, misalnya hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.
- b) Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung kegiatan pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan lain-lain.

#### 3) Pendukung Jasa Wisata

Pendukung jasa wisata merupakan usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata, tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk tersebut, misalnya penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, dan sebagainya.

#### 4) Pemerintah

Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyedia, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

#### 5) Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal merupakan penduduk yang bermukim di kawasan destinasi wisata. Masyarakat lokal merupakan salah satu aktor penting dalam pariwisata karena sesungguhnya masyarakatlah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Masyarakat lokal juga merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi oleh wisatawan. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat lokal.

#### 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

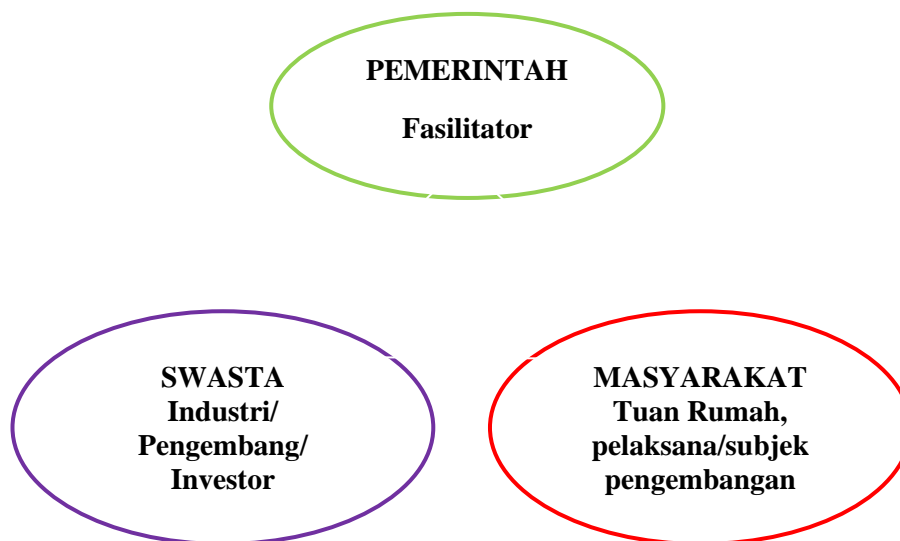
LSM merupakan organisasi non-pemerintah yang melakukan aktivitas kemasyarakatan di berbagai bidang, termasuk pada bidang pariwisata seperti *World Wildlife Fund* (WWF) yang memiliki proyek perlindungan orang utan pada beberapa kawasan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang pelaku pariwisata dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelaku pada kegiatan pariwisata seperti wisatawan atau pengunjung, industri pariwisata atau penyedia jasa, pendukung jasa wisata, pemerintah, masyarakat lokal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## 2.4 Kebijakan Kepariwisata di Indonesia

Di Indonesia terdapat kebijakan yang mengatur tentang kepariwisataan. Menurut Goeldner dan Ritchie (Mardiastuti dan Rohman, 2014), kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan atau promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Dalam kegiatan kepariwisataan terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan. Berikut gambaran ilustrasi pemangku kepentingan dalam pariwisata (Sunaryo, 2013).





Sumber: Sunaryo (2013).

**Gambar 2. Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata.**

Berdasarkan gambar 2, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih kecil dibandingkan dengan kedua *stakeholder* lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sunaryo (2013) mengungkapkan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah industri swasta.

Berkaitan dengan kepariwisataan, maka dalam pengelolaannya terdapat pemicu dan penguat. Pemicu disini diartikan sebagai latar belakang terciptanya kegiatan pariwisata, didalamnya terdapat aktor-aktor yang berperan. Dalam pengelolaan wisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro yang menjadi pemicu terjadinya pariwisata yaitu terdapat pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan

pariwisata. Untuk mendorong pemicu maka terdapat aktor yang menggerakkan masyarakat yaitu, akademisi yang memiliki inisiasi menciptakan ruang kreatif agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola keanekaragaman resep yang dimiliki untuk dijadikan kuliner tradisional, serta dapat mengemasnya secara kreatif sehingga menarik untuk dikunjungi. Pemerintah merupakan aktor yang menjadi penguat kegiatan pariwisata ini, dengan tidak menarik retribusi dan pajak.

Tujuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan dimaksudkan agar mampu menunjang gerak pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan citra bangsa. Akan tetapi, dalam menunjang gerak pembangunan tersebut tidak akan lepas dari peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, aksesibilitas yang dapat dijangkau dengan mudah dan baik, serta sumber daya manusia yang mampu menopang peran pemerintah tersebut (Vianti dkk., 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pada pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, tidak hanya itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerahnya, memfasilitasi, mempromosikan, serta menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, pada pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menjadi aktor utama dalam pengembangan pariwisata, khususnya dalam hal pengelolaan daya tarik dan pembinaan masyarakat sekitar objek wisata. Akan tetapi yang menjadi pelaksana dalam kegiatan pengembangan kawasan pariwisata adalah satuan kerja teknis

yang terkait, swasta dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata, dalam Perda tersebut dijabarkan bahwa:

Penyelenggaraan Kota Wisata di Kota Metro harus mampu memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian masyarakat lokal dan pengembangan wilayah serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kerjasama dengan swasta, akademisi, dan sektor informal dalam mendukung pengembangan pariwisata. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan dan penyelenggaraan pariwisata pada tataran kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran selaras dengan visi Kota Metro. Dalam upaya mendukung perintisan pengembangan daya tarik wisata, pemerintah daerah memperkuat upaya pengelolaannya. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pariwisata dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, dan berperan dalam pengelolaannya.

Ruang lingkup penyelenggaraan pariwisata di Kota Metro mencakup dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dalam konteks tersebut berbagai potensi pariwisata yang ada di Kota Metro perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi atau industri kreatif.

Berdasarkan penjelasan tentang kebijakan pariwisata tersebut maka dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata bukan hanya dalam upaya peningkatan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja, namun juga menekankan keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

## **2.5 Kerangka Pikir**

Pengangguran merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, salah satu penyebab yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Arsyad menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat kemiskinan dengan pengangguran (Susanto dkk., 2017). Sehingga persoalan penciptaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab negara, seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa tugas dan tujuan negara salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Masalah

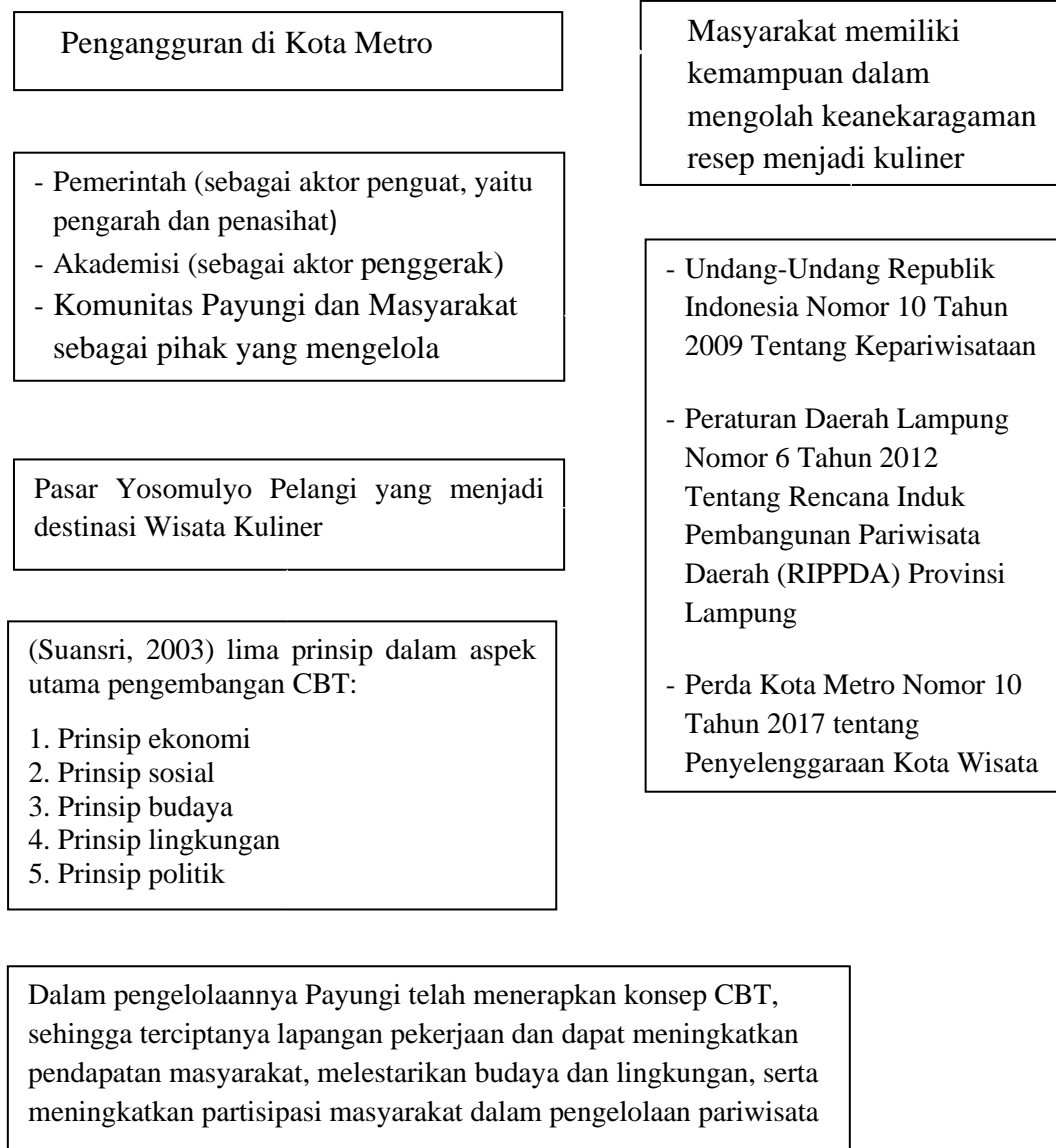
pengangguran tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional, salah satunya di Kota Metro. Tahun 2018 data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 4.723 orang pengangguran.

Menyikapi persoalan pengangguran di Kota Metro sebuah inisiasi dari Bapak Dharma Setyawan (akademisi) untuk menggerakkan masyarakat dengan potensi yang dimiliki, salah satunya kemampuan dalam mengolah keanekaragaman resep serta kekayaan jenis masakan dari tradisi dan etnik yang ada, sehingga dapat dikembangkan menjadi olahan kuliner tradisional yang dikemas dengan menarik agar dapat mendatangkan pengunjung dan dijadikan destinasi wisata. Maka, terbentuklah Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) yang menjadi destinasi wisata kuliner tradisional. Dalam kegiatan pariwisata terdapat istilah pemicu, penggerak, dan penguat, pemicu disini merupakan latar belakang terbentuknya kegiatan pariwisata dan aktor yang terlibat. Pada pengelolaan Payungi timbulnya pendapatan yang menjadi penggerak masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Aktor yang berperan sebagai penggerak yaitu akademisi, serta aktor penguat adalah pemerintah yaitu sebagai pengarah dan penasihat.

Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan pariwisata, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata. Dalam masing-masing kebijakan pariwisata tersebut dijelaskan bahwa pengembangan dan pengelolaan pariwisata bukan hanya dalam upaya peningkatan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja, namun juga menekankan keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Menurut Hudson dan Timothy (Sunaryo, 2013), pariwisata yang berbasis komunitas atau masyarakat (*Community Based Tourism*) merupakan suatu wujud aktif pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat sekitar tempat wisata. *Community Based Tourism* (CBT) ini

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat pariwisata diperuntukkan bagi masyarakat. Dengan begitu, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan wisata kuliner di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) dengan menggunakan konsep dari Suansri (2003), bahwa CBT memiliki lima prinsip dalam aspek utamanya yaitu prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Berikut bagan gambar kerangka pikirnya:



Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2021).  
**Gambar 3. Kerangka Pikir.**

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun alasan menggunakan metode kualitatif yaitu karena ingin memverifikasi, bukan ingin membuktikan atau menguji sesuatu. Peneliti ingin mengamati fenomena dalam proses pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi), berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat dengan Payungi, serta menafsirkan pendapat mereka tentang penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT), sehingga peneliti dapat menyimpulkan fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme*, yaitu memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang *holistik* atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang bersifat interaktif (Sugiyono, 2016).

Logika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu induktif. Logika induktif dimaksudkan sebagai penarikan fakta-fakta atau observasi-observasi spesifik menuju kesimpulan umum yang hanya digunakan untuk menjelaskan ragam fakta yang ada. Dalam pengumpulan datanya bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Selain itu, karena data yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen berupa data deskriptif, dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Penyajian data penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, tabel, gambar, dan yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

## **3.2 Jenis dan Sumber Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data merupakan kata-kata dan data-data sebagai penambahan dalam melengkapi data penelitian. Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut jenis data menurut sumbernya:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro. Dengan sumber data yang diperoleh dari informan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Umumnya data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Jenis data sekunder dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah jurnal, dokumen arsip, dan artikel yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata.

### **3.2.2 Sumber Data**

Berdasarkan jenis data, maka sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan. Sedangkan jenis data sekunder diperoleh



dari sumber dokumen. Berikut merupakan sumber dari jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Informan

Informan merupakan orang-orang yang berhubungan dan memiliki informasi tentang fokus penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat Kelurahan Yosomulyo yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Pelangi) Kota Metro, masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Informan merupakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif, berikut merupakan data informan dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Data Informan**

No	Informan	Jabatan
1.	Ibu Melidarti Jayasinga	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro
2.	Bapak Sukadi	Ketua Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Yosomulyo
3.	Bapak Dharma Setyawan	Penggagas Wisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)
4.	Bapak Ahmad Tsauban	Ketua Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)
5.	Erik	Koordinator Bank Sampah Cangkir Hijau
6.	Ibu Nurjanah	Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)
7.	Ibu Sabichis	Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)
8.	Ibu Rusdiana	Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)
9.	Agung Saifudin	Pengunjung Payungi
10.	Agung Prasetyo	Pengunjung Payungi

Sumber: Dibuat oleh peneliti (2021).

## **b. Dokumen-dokumen**

Dokumen adalah arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen merupakan sumber data sekunder dalam penelitian kualitatif. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan pariwisata yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
2. Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata.
3. Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.
4. Dokumen Monografi Kelurahan Yosomulyo Tahun 2020.
5. Data Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi).

## **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2016). Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini melakukan observasi dengan mendeskripsikan pengelolaan pariwisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi). Beberapa observasi yang akan dilakukan peneliti antara lain:

- 1) Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pada saat gelaran Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) pada hari minggu pagi.
- 2) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjualan di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) berupa pesantren wirausaha, yang dilaksanakan pada hari rabu malam pukul 19.30-21.30.

- 3) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan gotong royong dalam mempersiapkan gelaran Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) pada hari sabtu pagi pukul 07.00 dan sore pukul 16.00.
- 4) Melakukan pengamatan terhadap kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dari sampah setelah gelaran pasar, yaitu pada hari minggu siang.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi tertentu dan dilakukan oleh dua pihak. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2016), wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu seperti perekam suara, buku, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Menurut Sudarwan (Djaelani, 2013), terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif terdapat dua jenis wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara tertutup adalah wawancara yang berfokus pada suatu topik tertentu dan umum yang dibantu dengan pedoman wawancara yang dibuat secara rinci.
- 2) Wawancara terbuka adalah peneliti memiliki kebebasan untuk berbicara secara luas dan mendalam dalam kegiatan wawancara.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka, karena peneliti ingin memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa foto, tulisan, gambar, catatan, buku, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Mengkaji suatu dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki suatu data yang

berasal dari dokumen, *file*, maupun catatan dan hal-hal lain yang dapat didokumentasikan. Melalui kajian dokumen ini akan mempermudah peneliti dan jika terjadi kesalahan mudah untuk diganti karena narasumbernya tidak berubah. Untuk mempermudah kerja di lapangan, hal pertama yang dilakukan yaitu membuat pedoman dokumentasi (Djaelani, 2013). Berikut merupakan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan dijadikan sumber data:

**Tabel 3. Dokumen Terkait Pariwisata**

No	Dokumen	Keterangan
1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Undang-undang ini berisikan tentang hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komperhensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, peraturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.
2.	Perda Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata	Peraturan ini berisikan tentang pedoman bagi penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro yang dapat digunakan oleh semua komponen <i>stakeholders</i> pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kota wisata di Kota Metro dalam rangka mencapai visi kota wisata keluarga.
3.	Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung	Peraturan ini dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di Daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). RIPPDA ini berlaku selama dua puluh tahun sejak diterbitkan pada 2012 sampai dengan 2031.
4.	Monografi Kelurahan Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota	Dokumen ini berisikan tentang rincian data dan statistik pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kondisi

Metro Tahun 2020                      geografis Kelurahan Yosomulyo.

5.	Data Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi)	Dokumen ini berisikan tentang rincian data yang berkaitan dengan Payungi seperti, data pedagang, omset, struktur organisasi.
----	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif merupakan langkah pertama dalam menganalisis data dengan mengumpulkan data, kemudian menyusun secara sistematis, data yang sudah disusun kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan foto, menarik kesimpulan dari hasil analisis, setelah itu mempresentasikan hasil penelitian, Miles and Huberman (Sugiyono, 2016). Berikut penjelasannya:

#### 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dengan demikian data yang diperoleh banyak dan bervariasi. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata seperti pesantren wirausaha, penyuluhan yang diadakan untuk pedagang, gotong royong mempersiapkan dan membersihkan pasar, serta saat gelaran pasar berlangsung. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Serta melakukan dokumentasi berupa foto pada setiap kegiatan yang dilakukan, baik saat observasi maupun wawancara.

#### 2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini artinya data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam penelitian ini data yang direduksi yaitu pada dampak setelah adanya destinasi wisata Payungi yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

3) Penyajian Data (*Display Replay*)

Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau sebagian besar dari penelitian, yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penelitian ini penyajian datanya diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto atau gambar, tabel, dan sejenisnya untuk menjelaskan penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro.

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Penelitian ini menarik kesimpulan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang berdasarkan jenis data primer dan sekunder, sehingga diperoleh jawaban tentang penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro. Berikut bagan model interaktif dalam analisis data:

*Data Collection*

*Data Display*

*Data  
Reduction*

*Conclusion:  
drawing/verifying*

Sumber: Sugiyono (2016).

**Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/Model Interaktif.**

### 3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan pengujian *dependability*.

#### 1. Triangulasi

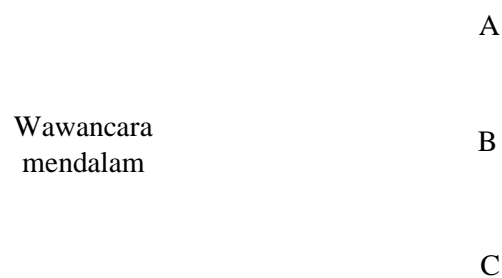
- a. Triangulasi teknik, yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Adapun triangulasi yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi dari sumber data yang sama dan serempak sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Berikut gambar triangulasi teknik:



Sumber: Sugiyono (2016).

**Gambar 5. Triangulasi “Teknik” Pengumpulan Data (Beragam-macam cara pada sumber yang sama).**

- b. Triangulasi sumber, teknik keabsahan data ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan teknik yang sama. Adapun teknik triangulasi sumber yang ditempuh yaitu, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembandingan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Berikut gambar triangulasi sumber, pada teknik keabsahan data:



Sumber: (Sugiyono, 2016).

**Gambar 6. Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data (Satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data A,B,C).**



2. Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan demikian, dalam penelitian ini pemeriksaan teman sejawat berarti pemeriksaan dengan cara mengumpulkan teman sejawat (teman mahasiswa jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 dan beberapa angkatan 2016 yang mengambil penelitian kualitatif) yang memiliki pengetahuan umum luas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil menyediakan pandangan kritis, sebagai pembanding, dan membantu mengembangkan langkah berikutnya.
3. Pengujian *dependability*, teknik ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Untuk pengujian *dependability* dilakukan oleh dosen pembimbing selama proses bimbingan berlangsung dengan memeriksa aktivitas penelitian ditunjukkan dengan bukti yang dimiliki oleh peneliti.

### **3.6 Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian kualitatif maka ditetapkan fokus penelitian. Fokus ini dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan. Pembatasan penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi masalah yang akan dipecahkan. Peneliti memiliki fokus pada penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengelolaan wisata kuliner tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro dengan menggunakan teori *Community Based Tourism* Suansri (2003) yang melihat aspek utama dalam pengembangan CBT berupa lima prinsip yaitu:

1. Prinsip ekonomi, dengan indikator terciptanya lapangan pekerjaan, timbulnya pendapatan masyarakat.
2. Prinsip sosial, dengan indikator adanya peningkatan kebanggaan komunitas.
3. Prinsip budaya, dengan indikator mendorong untuk menghormati budaya yang berbeda.
4. Prinsip lingkungan, dengan indikator terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

5. Prinsip politik, dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal.

### **3.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian secara dokumen dan praktik-praktik bagaimana proses pengelolaan pariwisata didapat dari Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) dan lingkungan pasar yang berada di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, serta rumah masyarakat yang diobservasi oleh peneliti.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Simpulan merupakan temuan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang peneliti buat untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro yang dianalisis menggunakan teori (Suansri, 2003). Menurutnya terdapat lima prinsip dalam aspek dasar CBT yaitu prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip lingkungan, dan prinsip politik.

Destinasi Wisata Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) dalam setiap kegiatan pengelolaannya telah melibatkan masyarakat lokal dan menerapkan konsep *Community Based Tourism* (CBT) yaitu prinsip ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan politik. Payungi telah memberikan manfaat ekonomis berupa lapangan pekerjaan kepada 66 orang sehingga mengurangi angka pengangguran di Kota Metro, serta menambah pendapatan masyarakat lokal. Namun pada prinsip budaya, kuliner yang disajikan di Payungi masih kurang bervariasi, banyak persamaan olahan makanan yang sama. Begitu juga pada prinsip politik, belum adanya campur tangan secara langsung dari pemerintah dikarenakan segala pengelolaan diserahkan penuh kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah, dan juga Pokdarwis yang tidak terlibat dalam pengelolaan Payungi karena kurangnya komunikasi antara Pokdarwis dengan pengurus Payungi.

## 5.2 Saran

Melihat usaha pengembangan yang dilakukan oleh Komunitas Payungi ini menunjukkan keinginan besar untuk membuat destinasi wisata yang mereka kelola terus mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas sarana prasarana maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Hanya saja peneliti melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan, seperti:

- a) Perlu adanya pelatihan yang diadakan untuk para pedagang dari pengusaha kuliner atau yang dibidangnya agar kuliner yang dijual lebih bervariasi.
- b) Perlunya peran Pokdarwis atau pemerintah untuk mengembangkan Payungi agar semakin banyak menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, serta memperkenalkan Kota Metro lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Bagyono. (2014). *Pariwisata dan Perhotelan*. CV Alfabeta.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Graha Ilmu.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. PT. Grasindo.
- Murdiastuti, A., & Rohman, H. (2014). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance* (A. Murdiastuti (ed.); 1st ed.). Pustaka Radja.
- Paturusi, S. A. (2008). *Perencanaan Kawasan Pariwisata*. Udayana University Press.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Andi.
- Safitri, A. D. (2012). *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Wisata Agro Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. Institut Pertanian Bogor.
- Simanjuntak, P. J. (2003). *Undang-Undang yang Baru tentang Ketenagakerjaan*. Kantor Perburuhan Internasional.
- Suansri, P. (2003). Community based tourism handbook. In *Community Based Tourism Handbook*.
- Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta, cv*.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi pariwisata: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2018). *Tata Kelola Pariwisata Teluk Kiluan Berkelanjutan (Pertama)*. Graha Ilmu.
- Warpani, S., & Warpani, I. (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. ITB.
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: introduksi, informasi dan implementasi* (B. Pribadi (ed.)). Kompas Media Nusantara.

**Sumber Jurnal:**

- Ahsani, R. D. P., Suryaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135.
- Ånstrand, M. (2006). Community-based tourism and socio-culture aspects relating to tourism: A Case Study of a Swedish student excursion to Babati (Tanzania). In *Environment and development in the South*.
- Aryunda, H. (2011). Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu. *Journal of Region and City Planning*. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.1.1>
- Demartoto, A. (2009). Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Sebelas Maret University Press*.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Majalah Ilmiah Pawitatan*, 20.
- Hamdana, F., & Alhamdu. (2015). Subjective Well-Being Siswa Man 3 Palembang Yang Tinggal Di Asrama. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/560/498>
- Herawati, N. (2015). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Subak Sebagai Bagian Warisan Budaya Dunia UNESCO Di Desa Mangesta Kabupaten Tabanan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v02.i01.p05>
- Hidayanti, S. (2020). *Community Based Tourism (CBT) Pada Wisata Religi Sunan Bonang Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kutorejo Kabupaten Tuban* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
- Lankford, S. ., Grybovyh, O., & Lankford, J. (2017). *Introduction to Community Tourism A North American Perspective Introduction to Community Tourism A North American Perspective*.
- Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism ( CBT ) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), 36–46.
- Prihantika, I., Utoyo, B., Rahmadhanic, T. P., & Sutiyo. (2019). *Seminar nasional fisip unila (sefila) - 3 tahun 2019*.
- Safitri, A. D. (2012). *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Wisata Agro Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo*. Institut Pertanian Bogor.
- Suwarjo. (2019). Community Based Tourism dalam Pengelolaan Desa Wisata Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul. *Populika*, 7(1).
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal*

*Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP ). 2(2), 9–17.*

Vianti, O., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2021). Strategi Media Branding Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai Destinasi Wisata Internasional. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 3 Nomor 1*. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i1.68>

Warpani, S., & Warpani, I. (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. ITB

Yuliana, R. (2019). Pengembangan Digital Tourism Destination Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata (Studi Tentang Optimalisasi Program Lampung Go Digital Di Pasar Tahura, Kabupaten Pesawaran). Universitas Lampung.

Ziwista, B. (2016). Pengelolaan Berbasis Community Based Tourism Pada Objek Wisata Air Panas Pawan Kabupaten Rokan Hulu provinsi Riau. *JOM FISIP, 3(2), 1*

#### **Sumber Dokumen:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Wisata.

Monografi Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2020.

Data Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) 2018-2021.

#### **Sumber Internet:**

Asmara, C. G. (2018, May). Tingkat Pengangguran di Februari 2018 Membaik ke 5,13%. *CNBC Indonesia*, 1. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180507120155-17-13886/tingkat-pengangguran-di-februari-2018-membaik-ke-513>

Ayo Kelampung, Youtube.com. (2021)Payungi Pasar yosomulyo Pelangi (Indonesia Pagi TVRI) <https://youtu.be/USTs8sbyncg>. Diakses pada 13 Oktober 2021.

Payungi, Instagram.com. (2021). Sekolah Penggerak Pariwisata. Dalam [https://www.instagram.com/p/COMFHGoBn42/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/COMFHGoBn42/?utm_medium=copy_link) \_\_diakses pada 30 Juni 2021.

- Payungi, Instagram.com. (2021). Penyuluhan Pembuatan Pupuk Kompos [https://intagram.com/p/CQrwlclt0dO/?utm\\_medium=copy\\_link](https://intagram.com/p/CQrwlclt0dO/?utm_medium=copy_link). Diakses pada 30 Juni 2021.
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: introduksi, informasi dan implementasi* (B. Pribadi (ed.)). Kompas Media Nusantara.
- Yolanda, E., Susiwi, F., Diana, M., Arter, I., Rahmawatin, Partini, N. P. D., Rahayu, A. W., & Prama, D. R. (2021). *Kota Metro dan Angka 2021* (W. D. Indriani & E. Yolanda (eds.); 1st ed.). Cv. Jaya Wijawa. <https://metrokota.bps.go.id/publication/2021.02/26/591e304e1f923d4435839c3b/kota-metro-dalam-angka-2021.html>